



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUNTARI LAKSMITADEWI WAHYUNINGDYAH
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 213982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 15.796.393.944

1. Tanah dan Bangunan Seluas 607 m2/406 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 7.000.000.000
2. Bangunan Seluas 73.82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Bangunan Seluas 49 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/134 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
6. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.086.393.944
7. Bangunan Seluas 63 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
8. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 480.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	328.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.266.002.093
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	23.870.396.037
III. HUTANG	Rp.	4.370.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.500.396.037

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.